

Pemerintah Kalimantan Timur berkomitmen untuk menerapkan pembangunan hijau. Upaya tersebut diawali dengan Deklarasi Kaltim Hijau (2010). Kemudian diperkuat dengan Deklarasi Kesepakatan Pembangunan Hijau atau *Green Growth Compact* (GGC) di Samarinda dan Jakarta (2016). Kesepakatan ini, kemudian diturunkan dalam bentuk pengembangan inisiatif model pengelolaan sumber daya alam dengan kolaborasi dan kemitraan. Tujuannya adalah membangun peluang, ide, dan cara baru dalam memecahkan masalah pengelolaan berbasis ekosistem melalui pendekatan skala lanskap.



Program Karbon Hutan Berau (PKHB)



Program kemitraan untuk merencanakan penggunaan lahan yang mengakomodasi kebutuhan pembangunan serta berupaya mempertahankan cadangan karbon menuju Kabupaten Berau yang sejahtera, unggul dan berdaya saing, dalam rangka penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).



Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)



Program REDD+ dengan skema kompensasi insentif berbasis kinerja dalam kurun 2020-2024 di seluruh yurisdiksi Kaltim. Jumlah penurunan emisi yang diharapkan dalam program ini adalah 22 juta tCO²e sampai 2025.



Perkebunan Berkelanjutan



Identifikasi dan verifikasi Areal bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) di tujuh kabupaten se-Kalimantan Timur. Luasan ANKT yang disepakati para pemangku kepentingan sebesar 456.827 hektare (sesuai Kep. Gub No. 525/K.244/2022).



Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Wehea-Kelay.



Kawasan yang dikelola Forum KEE Wehea-Kelay dengan rencana pengelolaan seluas 532.143 ha. Bentang Alam ini memiliki kekayaan alam sebanyak 713 jenis tanaman, dan 507 spesies satwa liar termasuk orang utan sebagai spesies payung (Atmoko *et al*, 2018). Populasi orang utan kalimantan sekitar 1282 individu (Rifqi *et al*, 2020).



Perhutanan Sosial



Pemerintah Kalimantan Timur menargetkan luasan perhutanan sosial hingga 330.000 Ha. Hingga 2023, luasan perhutanan sosial sudah tercapai sebesar 242.593 Ha dalam lima skema yaitu: hutan adat, hutan desa, kemitraan kehutanan, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat.



Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)



Kalimantan Timur sudah memiliki *Roadmap* (Peta Jalan) Percepatan Pembangunan KPH Kalimantan Timur menuju Kemandirian tahun 2018-2028. Peta jalan ini berisikan strategi, program, serta rencana aksi untuk dua unit KPH Lindung dan 18 unit KPH Produksi dengan total luas wilayah kelola sebesar 8,1 juta ha.



Program Kampung Iklim (ProKlim)



Program yang mendorong masyarakat dan seluruh pihak berpartisipasi dalam mitigasi dan adaptasi dampak krisis iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Kalimantan Timur mengintegrasikan Proklim dengan REDD+ ke dalam perencanaan tata ruang wilayah desa dan dalam rencana pembangunan desa. Hingga tahun 2022, Kaltim memiliki 91 kampung iklim terdaftar di Sistem Registri Nasional



Kemitraan Pengelolaan Kawasan Delta Mahakam



Inisiatif model yang bertujuan mengurangi tekanan deforestasi dan meningkatkan upaya restorasi terhadap wilayah mangrove yang terdegradasi di kawasan seluas 150 ribu hektare. Kini (2022) wilayah yang sudah diintervensi mencapai 115 ribu hektare.



Implementasi akSi Inspiratif warGA untuk Perubahan (SIGAP)



Tujuan SIGAP Sejahtera adalah perbaikan aspek: tata kelola pemerintah kampung, tata kelola sumber daya alam, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebanyak 99 kampung di Berau berkomitmen melaksanakan SIGAP Sejahtera sejak 2018. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), sudah ada 11 kampung berstatus mandiri dan hanya satu yang berstatus tertinggal di Kabupaten Berau (2022).



Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun



Pengembangan kemitraan perusahaan dengan masyarakat; pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun; penguatan kapasitas Kelompok Tani Peduli Api (KTPA); serta implementasi pembukaan lahan tanpa bakar. Kini (2022), sudah ada 103 KTPA dengan lebih dari 50 perusahaan yang bermitra di seluruh Kalimantan TImur



Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Kota Balikpapan



Gerakan yang mendorong aktivitas kehidupan untuk mengurangi dampak negatif krisis iklim hingga menjadi gerakan keseharian di perkotaan.



Kemitraan Perlindungan Lahan Basah Mesangat-Suwi



Kemitraan kolaboratif demi perlindungan ekosistem lahan basah dengan habitat utama untuk spesies endemik buaya badas hitam (*Crocodylus siamensis*). Kawasan seluas 13 ribu hektare ini juga menjadi habitat untuk kucing tandang, bekantan, buaya senyulong, bangau tong-tong, dan ikan belida. Wilayah ini memiliki ekosistem yang unik berupa rawa, riparian, dan danau.



Pengelolaan Kolaboratif Ekosistem Lahan Gambut Muara Siran



Lahan gambut seluas 42 ribu hektare ini dikelola kolaboratif. Pengelolaannya berupa harmonisasi antara konservasi, restorasi, dan rehabilitasi lahan gambut dengan pembangunan desa. Khususnya untuk pengembangan ekowisata, perikanan tangkap, penguatan tata kelola, serta peningkatan ekonomi alternatif. Kawasan ini memiliki nilai penting sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai Mahakam, termasuk kaskade tiga danau di sekitarnya (Semayang, Melintang, Jempang).